

TESIS
PENGARUH-SPASIAL INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SPATIAL INFLUENCE OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN SOUTH
SULAWESI PROVINCE

IHSAN ASHARI

A032211001



PROGRAM STUDI MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



TESIS
PENGARUH-SPASIAL INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SPATIAL INFLUENCE OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN SOUTH
SULAWESI PROVINCE

IHSAN ASHARI

A032211001



PROGRAM STUDI MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



TESIS

PENGARUH-SPASIAL INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

IHSAN ASHARI
A032211001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

pada tanggal **6 November 2023**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

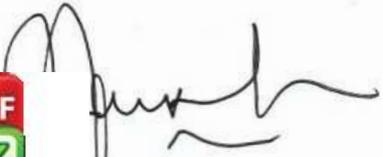

Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu, SE., M.Si.
NIP. 19650225 199303 1 002


Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si CWM®
NIP. 19770913200212 2 002

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,




Tri Abdireviane SE., MA. CWM®
199903 2 001


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsan Ashari

NIM : A032211001

Program Studi : Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul: **PENGARUH-SPASIAL INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN** merupakan karya ilmiah yang ditulis secara langsung oleh penulis dan belum pernah diajukan atau diterbitkan sebelumnya dan bebas dari masalah praktek plagiasi kecuali terkait pengutipan beberapa karya lainnya pada draft ini namun hal tersebut dituliskan dalam bentuk kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya dan jika dikemudian hari didapatkan terdapat masalah pelanggaran maka saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Makassar, 14 November 2023

Yang membuat pernyataan



Ihsan Ashari



PRAKATA

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah senantiasa memberi nikmat baik kesehatan maupun keselamatan dan atas izin-Nya penulis mampu dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul "*Pengaruh-Spasial Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan*". Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW., semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kelemahan serta kekurangan dalam penulisan karya ini terkait dengan berbagai keterbatasan maupun kemampuan penulis. Namun dengan dorongan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Diharapkan tulisan ini dapat memberi manfaat dan implikasi dalam semakin memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan banyak ucapan terimah kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Bapak Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM
2. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Ibu Dr. Indraswati T.A Reviane, S.E., M.A., CWM
3. Pembimbing I Bapak Dr.Ir. Muhammad Jibril Tajibu, S.E.,M.Si
4. Pembimbing II Ibu Dr. Retno Fitrianti, S.E., M.Si., CWM.
5. Penguji I Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S.
6. Penguji II Bapak Dr.Sanusi Fattah, S.E., MA., CWM. , CSF.
Penguji III Ibu Dr. Indraswati T.A Reviane, S.E., M.A., CWM.
dua orang tua, Abdul Aziz Baco dan Rosmah T serta keluarga lainnya.



9. Seluruh kerabat dan kawan-kawan mahasiswa Program Pasca Sarjana
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika
selama proses penulisan terdapat sikap ataupun perkataan yang kurang
berkenaan di hati.

Makassar, 06 November 2023

Ihsan Ashari



ABSTRAK

IHSAN ASHARI. Pengaruh-Spasial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Muhammad Jibril Tajibu dan Retno Fitrianti).

Berbagai studi telah dilakukan untuk memahami keterkaitan wilayah dan sifatnya dalam rangka mendapatkan formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang tepat. Studi ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh-spasial indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan analisis regresi spasial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh spasial yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil uji dengan Indeks Moran's menunjukkan bahwa terjadi korelasi spasial dalam data. Model SEM merupakan model terbaik berdasarkan hasil pengujian *lagrange multiplier*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh-spasial Indeks Pembangunan Manusia antar wilayah, variabel penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variabel konsumsi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan variabel *Spatial Error* menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan variabel *error* antar wilayah yang mempengaruhi Indeks Pembangunan manusia. Variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap Indeks pembangunan manusia.

Kata kunci: spasial analisis, indeks moran's, indeks pembangunan manusia,spasial *error* model (SEM)



ABSTRACT

IHSAN ASHARI. Spatial Influence on the Human Development Index in South Sulawesi Province (supervised by Muhammad Jibril Tajibu and Retno Fitrianti).

Various studies have been conducted to understand the interconnectedness of regions and their nature in order to get the right regional development policy formulation. This study was conducted to analyze the spatial influence of human development index in South Sulawesi Province using spatial regression analysis. This study aims to analyze the spatial influence that occurs in districts/cities in South Sulawesi Province. The test results with Moran's Index show that there is spatial correlation in the data. The SEM model is the best model based on the results of the lagrange multiplier test. The estimation results show that there is a spatial influence of the Human Development Index between regions, the poor population variable has a negative effect on the Human Development Index, the consumption variable has a positive effect on the Human Development Index, and the Spatial Error variable shows that there is a linkage of error variables between regions that affect the Human Development Index. Economic growth and capital expenditure variables have no effect on the Human Development Index.

Key words: spatial analysis, Moran's index, human development index, spatial error model (SEM)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	i
PRAKATA.....	ii
ABSTRAK.....	i
ABSTRACK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.1 Rumusan Masalah.....	8
1.2 Tujuan Penelitian.....	8
1.3 Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	9
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	9
2.1.2 Konsep Wilayah.....	11
2.1.3 Konsep Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	12
2.1.4 Interaksi Wilayah.....	18
2.1.5 Teori Konsumsi.....	19
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah.....	20
2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.1.8 Kemiskinan.....	23
2.1 Hubungan Antar Variabel.....	24
2.1.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	24
2.1.2 Hubungan Konsumsi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	26
2.1.3 Hubungan Belanja Modal terhadap IPM.....	27
2.1.4 Hubungan Jumlah Penduduk Miskin terhadap IPM.....	28
Tinjauan Empiris.....	29
KERANGKA KONSEPTUAL.....	34



3.1	Kerangka Konseptual	34
3.2	Hipotesis Penelitian	35
BAB IV METODE PENELITIAN		36
4.1	Jenis Penelitian	36
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	36
4.3	Jenis dan Sumber data	36
4.4	Metode Pengumpulan Data	36
4.5	Metode Analisis	37
4.5.1	Analisis Regresi	37
4.5.2	Analisis Regresi Spasial	37
4.5.3	Matriks Pembobot	39
4.5.4	Efek Spasial	40
4.5.4	Tahapan Analisis Data	42
4.6	Definisi Operasional	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		45
5.1	Gambaran Umum	45
5.2	Deskripsi Data	46
5.2.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021	46
5.2.2	Keadaan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2022	48
5.2.3	Belanja Modal Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan	49
5.2.4	Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	51
5.2.5	Konsumsi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.....	53
5.3	Analisis Hasil Penelitian	55
5.3.1	Model Regresi Linier Berganda.....	55
5.3.2	Matriks Pembobot Spasial	57
5.3.3	Indeks Moran	59
5.3.4	Uji LM	60
5.3.5	Regresi Spasial.....	61
5.4	Pembahasan	64
5.4.1	Pengaruh Spasial Indeks Pembangunan Manusia	64
	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	68
	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia..	71



5.4.4	Pengaruh Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	73
5.4.5	Pengaruh Konsumsi terhadap Indeks Pembangunan Manusia	75
BAB VI PENUTUP		78
6.1	Kesimpulan	78
6.2	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		87



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasifikasi capaian IPM.....	10
Tabel 5. 1 Hasil Analisis Model 1.....	55
Tabel 5. 2 Hasil Analisis Model 2.....	56
Tabel 5. 3 Hasil Uji Moran	59
Tabel 5. 4 Hasil Uji Langrange Multiplaier.....	60
Tabel 5. 5 Hasil Estimasi Spasial Error Model (Model 2)	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (%)	3
Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota.....	5
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 4.1 <i>Rook contiguity</i>	40
Gambar 4.2 <i>Bishop Contiguity</i>	40
Gambar 4.3 <i>Queen Contiguity</i>	40
Gambar 5.1 Peta Sulawesi Selatan	45
Gambar 5.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	47
Gambar 5.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 2022 (dalam %).....	49
Gambar 5.4 Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2022 (dalam miliar rupiah).....	50
Gambar 5.5 Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (dalam %).....	52
Gambar 5.6 Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (rupiah).....	54
Gambar 5.7 Jumlah Ketetangaan Tiap Kabupaten	58



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan perilaku-perilaku daerah tetangganya (Capello, 2009). Keterkaitan antara wilayah dan pembangunan perencanaan wilayah merupakan upaya untuk mengaplikasikan pembangunan ekonomi dalam dimensi keruangan sehingga perencanaan pembangunan wilayah merupakan akumulasi yang tidak terputus dari konsep pembangunan ekonomi. Menurut (Richardson, 1976), Dinamika ekonomi di suatu daerah dapat mempengaruhi daerah tetangganya melalui adanya efek limpahan (*spillover effect*) yang diberikan. *Spillover effect* merupakan dampak yang muncul karena adanya hubungan ketergantungan antar daerah. Dampak tersebut bisa berupa dampak yang diharapkan dampak positif maupun dampak yang tidak diharapkan atau dampak negatif (Richardson 1976). Salah satu model pertumbuhan wilayah yang terkenal dengan eksistensi keterkaitan spasialnya yaitu model kutub pertumbuhan yang digagas oleh (Perroux, 1955) Ruang sebagai suatu menimbulkan interaksi spasial, yang mendefinisikan ruang sebagai suatu jenis jaringan yang terorganisir secara terintegrasi. Perroux menjelaskan bahwa perkembangan yang terjadi pada kutub pertumbuhan akan menyebar melalui jalur tertentu dan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan melalui kekuatan-kekuatan sentrifugal keluar (*spread effect/trickledown effect*) dan sentripetal ke dalam (*polarization effect/spread effect*) (Wojnicka, 2014). Oleh karena itu, jika terdapat sebuah pernyataan

di pertumbuhan dalam suatu wilayah maka secara otomatis berkaitan pembangunan di wilayah-wilayah belakangnya (*hinterland*) (Cheshire PC,

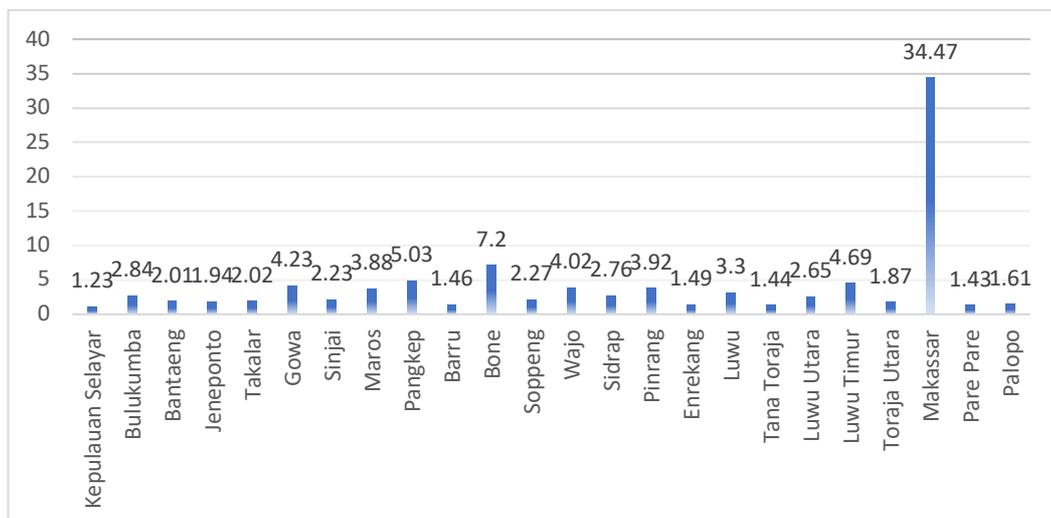


2004). Pendapat lain yang dikemukakan oleh Hirschman yang menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada pusat pertumbuhan atau daerah tertentu akan berpengaruh pada daerah belakangnya melalui efek polarisasi (*polarization effect*) dan *backwash effect*. *Backwash effect* merupakan dampak perkembangan inti/core yang merugikan daerah sekitarnya karena akan menyerap sumber daya di wilayah sekitar disebabkan adanya pemusatan pada wilayah tertentu. Perroux sendiri berhipotesis bahwa *spread effect* akan lebih besar daripada *polarization effect* sehingga pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah akan terwujud, Namun sebaliknya Myrdal berhipotesis bahwa *backwash effect* akan lebih besar daripada *trickledown effect* karena implikasi dari proses *cumulative causation* (Laksono et al., 2018). Namun beberapa penelitian justru mendukung hipotesis Myrdal bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih saja terjadi baik dalam lingkup nasional maupun lingkup regional yang diakibatkan kuatnya dampak balik dan lemahnya *effect sebar* (Iswanto, 2015).

Berdasarkan interpretasi spasial yang dikemukakan beberapa ahli terkait konsep pusat pertumbuhan (seperti Myrdal (1957), Boudville (1966), dan Friedmann (1972) dalam (Christina et al., 2017), dapat disimpulkan bahwa pusat pertumbuhan dapat mendorong *spread effect* atau *trickling down effect* dan *backwash effect* atau *polarization effect* terhadap daerah di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif terhadap perkembangan daerah sekitarnya disebut *spread effect*. Contohnya, seperti terbukanya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upah buruh semakin tinggi, dan penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Sedangkan pengaruh negatif disebut *backwash effect*. Contohnya, adalah adanya ketimpangan wilayah, kriminalitas dan kerusakan lingkungan meningkat.



Pembangunan pada kutub pertumbuhan akan memberikan manfaat bagi daerah sekitarnya jika diikuti penguatan infraskruktur dan transfer teknologi. Namun, jika tidak maka akan terjadi migrasi sumber daya yang berlebihan hingga menguras sumber daya dari wilayah sekitarnya (Capello R, 2011). Hal membuktikan bahwa keterkaitan spasial antarwilayah tidak selalu bernilai positif dimana perkembangan yang terjadi di suatu wilayah akan mempengaruhi daerah sekitarnya atau sebaliknya Interaksi spasial yang terjadi dapat saja saling melemahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya atau dapat saja pertumbuhan ekonomi terjadi secara asimetrik dimana hanya kutub pertumbuhan saja yang menikmati pertumbuhan ekonomi dengan menguras sumber daya di *hinterland* (Laksono et al., 2018).



Sumber: BPS Sulsel 2022 (Data diolah)

Gambar 1. 1
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (%)

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi strategi untuk cepat pembangunan ekonomi nasional Indonesia timur. Tabel diatas gambarkan kontribusi PDRB tiap wilayah disulawesi selatan, Kota Makassar



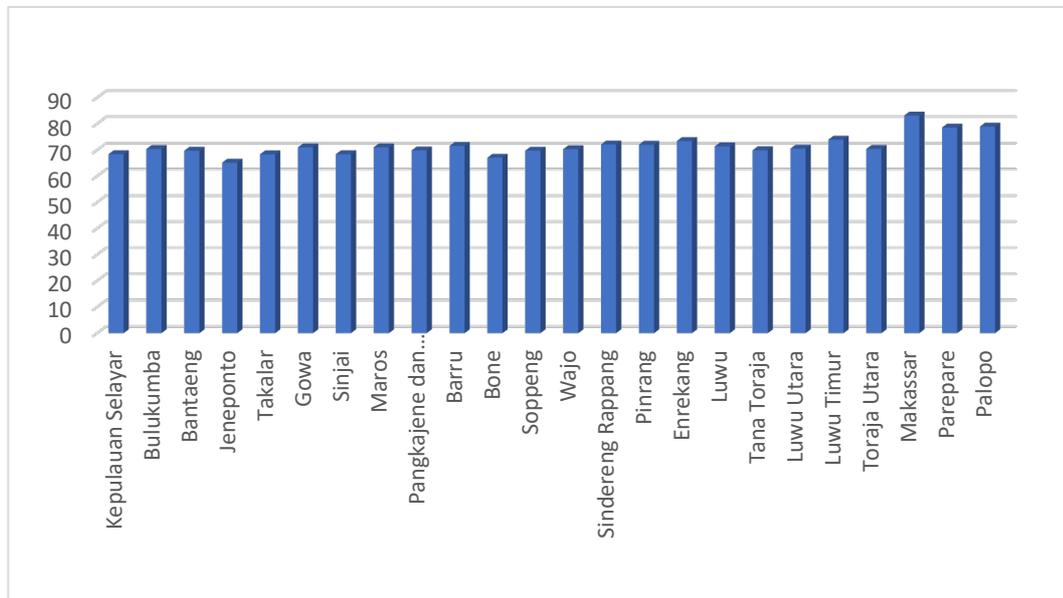
memiliki kontribusi terbesar diantara wilayah lainnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitar dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di Sulawesi selatan.

Tingkat kesejahteraan di provinsi Sulawesi selatan khususnya di Kota Makassar sebagai Ibu kota wilayah Sulawesi selatan harusnya dapat menyebar ke wilayah sekitarnya. Dalam konteks perencanaan wilayah keterkaitan antar wilayah melalui interaksi social dan ekonomi dapat ditingkatkan melalui interaksi wilayah dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah dipengaruhi oleh IPM di wilayah lain yang berdekatan Seperti yang dikemukakan oleh Friedman (1998) bahwa wilayah berkembang karena adanya interaksi antar pusat (*core region*) dan pinggiran (*hinterland*) sebagaimana dikemukakan dalam mode hubungan pusat dan pinggiran. Adapun bentuk hubungan antar daerah dalam bidang ekonomi dapat berupa arus atau aliran barang, keterkaitan produksi, aliran modal dan migrasi tenaga kerja, sehingga interaksi ini diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap wilayah sekitarnya dalam hal pemerataan pembangunan.

Sejalan dengan Hukum “Tobler” yang mengatakan bahwa “Setiap hal memiliki keterkaitan dengan hal lainnya, namun yang lebih berdekatan memiliki keterkaitan lebih dari lainnya”. Sangat wajar apabila wilayah yang dekat dengan pusat pertumbuhan seharusnya memiliki pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya karena adanya interaksi sosial ekonomi antar wilayah (Laksono et al., 2018). Kedekatan suatu wilayah dengan pusat pertumbuhan akan berdampak makin baik (positif) manakala diikuti oleh makin besarnya aliran yang terjadi antara pusat



pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya (Priyarsono, 2017).



Sumber: BPS Sulsel 2022 (Data diolah)

Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Berdasarkan data diatas jelas terlihat bahwa Berdasarkan gambar 1.2 Menunjukkan capaian pembangunan manusia Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan cukup bervariasi. Daerah yang mencapai IPM tertinggi adalah Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Pare-Pare. Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan pusat dari seluruh kegiatan, sarana dan prasarana Kota Makassar cukup memadai dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia. Sedangkan daerah yang mencapai IPM terendah selama pada tahun 2022 adalah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Dan Kabupaten Takalar. Jika di klasifikan dalam kategori tinggi rendahnya IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 hanya 7 kabupaten/kota yang berada

ategori tinggi dan 17 kabupaten kategori sedang. Hal tersebut arkan bahwa belum adanya adanya kecenderungan keterkaitan antar



wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu memberikan pengaruh terhadap wilayah sekitarnya sehingga pertumbuhan masih terpusat pada beberapa wilayah saja. Meskipun terdapat keterkaitan spasial, ternyata fenomena pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi masih disertai dengan ketimpangan yang tinggi masih dapat terjadi (Laksono et al., 2018).

Apabila sebuah wilayah berpengaruh negatif (*backwash effect*) terhadap wilayah sekitarnya maka hanya akan menguras sumberdaya wilayah sekitarnya. Lebih besarnya *backwash effect* dari pada *spread effect* menyebabkan terjadinya kebocoran ekonomi wilayah sehingga keseimbangan pembangunan jangka panjang sebagaimana dikatakan dalam teori klasik tidak dapat terjadi. Kebocoran ekonomi (*economic leakages*) mengacu pada kondisi hilangnya kesempatan masyarakat dan ketimpangan pendapatan akibat adanya aliran nilai tambah keluar wilayah. Penyebab dari adanya *backwash effect* adalah banyaknya impor dan pembelian yang dilakukan masyarakat suatu wilayah di luar wilayahnya menunjukkan rendahnya aktifitas penciptaan nilai tambah (*produksi olahan*) di wilayah tersebut (Avrom, 1991).

Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan untuk pemerataan pembangunan pada upaya peningkatan transaksi perdagangan antar wilayah sekitarnya agar pertumbuhan output, tenaga kerja, dan investasi pada akhirnya tidak hanya dinikmati oleh satu wilayah tetapi juga dapat dinikmati oleh daerah-daerah sekitarnya. Interaksi wilayah dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, belanja modal, penduduk miskin, dan



i rumah tangga. Hal ini bukan perkara mudah mengingat pentingnya
aan wilayah bagi para pengambil kebijakan dalam mendorong

pengembangan ekonomi wilayah melalui upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat (Sangkala et al., 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pasaribu, 2014) bahwa pusat-pusat pertumbuhan dapat berdampak *spillover* positif (*spread effect*) terhadap wilayah sekitarnya apabila pertumbuhan output dan pertumbuhan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan disertai dengan aliran ke wilayah sekitarnya sehingga mampu memberikan efek positif dalam kesejahteraan suatu wilayah. Menurut (Pasaribu et al., 2015) dalam meningkatkan dampak *spillover* pusat-pusat pertumbuhan, kebijakan yang disarankan adalah peningkatan investasi yang mendorong produktivitas di sekitar wilayah-wilayah pusat pertumbuhan, yang pada akhirnya secara bersama-sama akan meningkatkan output dan tenaga kerja yang berkualitas, baik di wilayah pusat-pusat pertumbuhan maupun bagi wilayah sekitarnya (Pristiawan & Kuncoro, 2016).

Studi empiris mengenai interaksi spasial diperlukan untuk menganalisis interaksi dan pola spasial Indeks Pembangunan Manusia pada wilayah yang ada dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis spasial penting untuk dilakukan karena dapat menganalisis interaksi spasial antara variabel-variabel dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan pembangunan di wilayah-wilayah yang berbeda. Dalam konteks pengembangan wilayah, informasi yang diperoleh dari analisis spasial dapat membantu pemerintah dalam merumuskan rencana pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan uraian latar permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka membuat suatu ketertarikan untuk mengamati hal



menjadi sebuah topik penelitian yang berjudul “***Pengaruh-Spasial
Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan***”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh-spasial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi, konsumsi, belanja Modal, dan penduduk miskin berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh spasial Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, konsumsi, belanja modal, dan penduduk miskin berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan

1.3 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan masalah yang sejenis agar dapat lebih mengembangkan bahasan penelitian.
2. Sebagai referensi tambahan dalam perencanaan dan strategi pembangunan, sehingga menciptakan pembangunan yang merata di setiap wilayah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

UNDP Sejak tahun 1990 menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)* yang merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok Pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*Basic Capabilities*) penduduk. Dengan demikian, IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. United Nations Development Programm (UNDP) telah menerbitkan laporan pembangunan sumber daya insani dalam satuan kuantitatis yang disebut dengan Human Development Indeks (HDI).

Teori tentang spillover Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya adalah bahwa tingkat IPM yang tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya melalui efek spillover. Efek spillover terjadi ketika tingkat IPM yang tinggi di satu wilayah memberikan dampak positif pada wilayah sekitarnya melalui berbagai mekanisme. (Joseph Stiglitz, 2002), seorang ekonom dan pemenang Nobel, menyatakan bahwa keberhasilan suatu negara dalam mencapai pembangunan manusia dapat memberikan dampak positif pada negara-negara tetangga dan membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan di seluruh wilayah.



beberapa mekanisme yang dapat mempengaruhi spillover antara IPM dan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya meliputi:

- a) Meningkatnya akses terhadap sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja.
- b) Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan penduduk, sehingga mengurangi beban biaya kesehatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
- c) Peningkatan ketersediaan sumber daya ekonomi, seperti akses ke modal dan teknologi, sehingga meningkatkan daya saing dan produktivitas wilayah sekitarnya.
- d) Peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan raya dan jaringan transportasi, sehingga memudahkan mobilitas dan perdagangan barang dan jasa.

Dalam upaya untuk membandingkan antarwilayah, dibentuklah klasifikasi IPM. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang Sama dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Tabel 2. 1
Klasifikasi capaian IPM

Klasifikasi	Capaian IPM
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

Sumber: BPS 2021



Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan IPM merupakan capaian pembangunan manusia berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibentuk dengan pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2021 yang diukur dalam satuan Persen. Adapun rumus menghitung IPM sebagai berikut:

- a. Menghitung Indeks Kesehatan

$$Ikesehatan = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

- b. Menghitung Indeks Pendidikan

$$IHLS = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ max} - HLS \text{ min}}$$

$$IRLS = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ max} - RLS \text{ min}}$$

$$Ipendidikan = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

- c. Menghitung Indeks Pengeluaran

$$Ipengeluaran = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

- d. Menghitung IPM

$$IPM = \sqrt[3]{Ikesehatan \times I \text{ pengetahuan} \times I \text{ Pengeluaran}} \times 100$$

2.1.2 Konsep Wilayah



pengertian wilayah sangat penting untuk diperhatikan apabila berbicara program- program pembangunan yang terkait dengan pengembangan an kawasan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional (“Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang” 2007). (Isard, 1975) menganggap pengertian wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (meaningfull) karena adanya masalah-masalah yang ada didalamnya sedemikian rupa. (Johnston, 1976) memandang wilayah sebagai bentuk istilah teknis klasifikasi spasial dan merekomendasikan dua tipe wilayah: (1) wilayah formal, merupakan tempat tempat yang memiliki kesamaan- kesamaan karakteristik dan (2) wilayah fungsional atau nodal, merupakan konsep wilayah dengan menekan kesamaan keterkaitan antarkomponen atau lokasi/tempat.

Berbeda dengan (Murty, 2000) mendefenisikan wilayah sebagai suatu area geografis, territorial atau tempat yang dapat berwujud sebagai suatu negara, negara bagian, provinsi, distrik (kabupaten), dan pedesaan. Wilayah pada umumnya tidak sekedar merujuk suatu tempat atau area, melainkan merupakan suatu kesatuan ekonomi politik, social, administrasi, iklim, hingga geografis, sesuai dengan tujuan pembangunan.

2.1.3 Konsep Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menurut (Richardson, 1976), kutub pertumbuhan adalah sekelompok industri yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dinamis disebabkan karena penerapan teknologi tinggi dan tingkat pertumbuhan inovasi yang pesat. Sehingga, memiliki keterkaitan erat antar-industri dan mampu memberikan efek limpahan dari daerah inti kepada daerah di sekitarnya.

Richardson juga menambahkan bahwa kutub pertumbuhan pada umumnya terjadi di perkotaan yang identik dengan fasilitas umum yang lebih lengkap. Berdasarkan definisi, Richardson (1978: 164–165), terdapat tiga aspek



penting yang dimiliki oleh kutub pertumbuhan: (1) memiliki pertumbuhan dan performa ekonomi yang tinggi. (2) memiliki kelompok industri yang saling terkait satu dengan yang lain; dan (3) memberikan efek limpahan kepada daerah di sekitarnya. Sehingga dalam menurut Richardson, tidak ada perbedaan antara kutub pertumbuhan dengan pusat pertumbuhan. Oleh karena itu menggunakan dua istilah tersebut secara bebas bergantian.

Beberapa teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional yang umum digunakan, antaranya

2.1.3.1 Teori Pusat Pertumbuhan Wilayah

Konsep pusat pertumbuhan dilandasi oleh konsep ruang ekonomi (economic space) yang dikemukakan oleh (Perroux, 1955). Perroux menyatakan bahwa, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang bersamaan, pertumbuhan akan muncul pada kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda dan dengan akibat yang berbeda pula (Sjafrizal, 2008). Adanya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang juga akan diikuti oleh pembangunan wilayah disekitarnya, karena pusat-pusat pertumbuhan dapat menyebabkan terjadinya spread effect (efek sebar) dari daerah kegiatan pusat pertumbuhan ke daerah sekitarnya, sehingga daerah sekitarnya juga akan dapat tumbuh dan berkembang (Pasaribu, 2014).

Friedman dalam (Rahardjo 2004) mengatakan bahwa ada lima buah proposisi utama peranan daerah inti dalam pembangunan spasial, yaitu sebagai berikut:



Daerah inti mengatur keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah di sekitarnya melalui sistem suplai, pasar, dan daerah

administrasi.

2. Daerah inti meneruskan secara sistematis dorongan-dorongan inovasi ke daerah-daerah di sekitarnya yang terletak dalam wilayah pengaruhnya.
3. Sampai pada suatu titik tertentu pertumbuhan daerah inti cenderung mempunyai pengaruh positif dalam proses pembangunan sistem spasial, akan tetapi mungkin pula mempunyai pengaruh negatif jika penyebaran pembangunan wilayah inti kepada daerah-daerah di sekitarnya tidak berhasil ditingkatkan, sehingga keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah di sekitarnya terhadap daerah inti menjadi berkurang.
4. Dalam suatu sistem spasial, hirarki daerah-daerah inti ditetapkan berdasar pada kedudukan fungsionalnya masing-masing meliputi karakteristiknya secara terperinci dan prestasinya.
5. Kemungkinan inovasi akan ditingkatkan ke seluruh daerah sistem spasial dengan cara mengembangkan pertukaran informasi.

2.1.3.2 Model Kumulatif Kausatif

Model kumulatif kausatif (Cumulative Causation Models) ini dipelopori oleh Gunnar Myrdal pada tahun 1955 dalam (Rustiadi E, Saefulhakim HRS 2009) memformulasikan sebab-sebab bertambah buruknya ketimpangan perkembangan ekonomi antar wilayah. Sebelumnya, teori klasik berkeyakinan bahwa mekanisme pasar dalam jangka panjang, dapat menciptakan struktur perkembangan wilayah yang seimbang. Sedangkan Myrdal berpendapat

adanya factor sebab akibat kumulatif (circular cumulative causation) proses pembangunan justru akan memperlebar ketimpangan-



ketimpangan tersebut.

Ada dua kekuatan penting yang dikemukakan Myrdal yakni:

- a. Wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang (back-wash effect).
- b. Wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang mendorong perkembangan wilayah-wilayah masih terbelakang (spread effect).

Adapun factor-factor yang menyebabkan terjadinya backwash effects adalah:

- a. Corak perpindahan penduduk dari wilayah yang masih terbelakang ke wilayah maju. Sejumlah tenaga kerja yang berpendidikan/berkualitas lebih dinamis dan selalu mencari alternative yang lebih baik. Adanya perkembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang lebih maju merupakan daya tarik bagi perpindahan tenaga kerja berkualitas tersebut. Sedangkan di wilayah terbelakang, yang terbelakang, yang tertinggal adalah orang-orang yang pada umumnya lebih konservatif. Keadaan demikian tidak menguntungkan bagi perkembangan wilayah yang masih terbelakang karena setiap saat kehilangan sumber daya manusia yang bermutu.
- b. Arus investasi yang tidak seimbang. Karena struktur masyarakat yang lebih konservatif, maka permintaan modal di wilayah terbelakang sangat minimal. Disamping itu, produktivitasnya yang rendah sangat tidak bisa merangsang bagi penanaman modal dari luar. Bahkan



modal yang ada didalam justru mengalir ke luar wilayah (wilayah yang lebih maju) karena lebih terjamin untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi

- c. Pola aktivitas perdagangan yang didominasi oleh industri industri di wilayah yang lebih maju. Sehingga wilayah terbelakang sangat sukar mengembangkan pasar dan hasil hasilnya
- d. Adanya jaringan-jaringan pengangkutan yang jauh lebih baik di wilayah yang lebih maju, sehingga kegiatan produksi dan perdangan dapat dilaksanakan lebih efisien.

Berdasarkan prinsip kausasi sirkuler kumulatif, dapat dijelaskan terjadinya ketidakmerataan ekonomi (internasional, nasional, dan regional). Apabila proses kausasi sirkuler kumulatif dibiarkan bekerja atas kekuatan sendiri, maka akan menimbulkan pengaruh merambat yang ekspansional di suatu pihak (spread effects) dan pengaruh pengurasan (backwash effect). Strategi campur tangan pemerintah yang dikehendaki adalah pengambilan tindakan kebijakan yang melemahkan backwash effect dan memperkuat spread effects agar proses kausasi sirkuler kumulatif mengarah ke atas. Dengan demikian semakin memperkecil ketidakmerataan (Fujita, 2007).

2.1.3.3 Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral dikemukakan oleh seorang ahli geografi Jerman yaitu Walter Christaller. Walter Christaller (1933) dalam (Priyadi & Atmadji, 2017) dengan model tempat sentral (central place model) mengemukakan bahwa daerah yang positif adalah daerah yang mendukung pusat kota. Pusat kota tersebut ada karena

bagai jasa penting harus disediakan tanah/lingkungan sekitar. Teori sentral (central place theory) menganggap bahwa ada hirarki tempat



dimana setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku).

Menurut (Priyadi and Atmadji 2017) yang menjelaskan teori Christaller tentang kota sentral yaitu pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lainnya. Kota sebagai pusat pelayanan diharapkan memiliki fasilitas pelayanan seperti:

- a. Pusat dan pertokoan sebagai fokus dari suatu kota.
- b. Saranan dan prasarana transportasi.
- c. Tempat rekreasi dan olahraga.
- d. Sarana point pendidikan, kesehatan, obyek wisata.

Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi, sehingga baik tempat tinggal maupun bekerja dan berkreasi dapat dilakukan didalam kota. Ada alasan untuk mendukung kota sebagai mesin pertumbuhan bagi daerah pedesaan di sekitarnya menurut (Richardson 1976) Pertumbuhan perkotaan dapat:

- a) Menciptakan kesempatan kerja bagi para penglaju di pedesaan.
- b) Menciptakan peluang baru bagi perusahaan-perusahaan untuk perusahaan untuk berlokasi di kota-kota kecil dan daerah pedesaan terdekat untuk melayani pasar perkotaan; dan
- c) Menyebabkan kemacetan yang lebih besar di kota-kota besar besar yang dapat mendorong perusahaan untuk mencari lokasi di kota-kota kecil terdekat kecil di dekatnya yang dapat mendorong perusahaan untuk berlokasi di kota-kota kecil dan masyarakat pedesaan.



2.1.4 Interaksi Wilayah

Keterkaitan antar wilayah menggambarkan hubungan antar wilayah dan diartikan sebagai interaksi. Secara harfiah interaksi dapat diartikan sebagai “hal yang saling mempengaruhi (Kasikoen, 2011). Menurut Meier disebutkan bahwa pertumbuhan wilayah terjadi akibat faktor yang saling berpengaruh. Wilayah berkembang karena adanya interaksi antar pusat (core region) dan pinggiran (hinterland) sebagaimana dikemukakan oleh John Fredmann dalam mode hubungan pusat dan pinggiran. (Brian J. Berry 1999) menyatakan bahwa wilayah tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem wilayah yang lebih besar. Teori ini mengasumsikan bahwa interaksi antara wilayah dalam sistem wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Teori Core Periphery yang dikembangkan oleh John Friedman (1966) yang menyatakan bahwa daerah itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu pusat yang dinamis (core) dan pinggiran yang statis (periphery). Teori ini menekankan bahwa ada hubungan yang erat antara daerah pusat yang dinamis (kota) dan daerah pinggiran yang statis (desa). Perkembangan daerah perkotaan akan sangat ditentukan oleh daerah di sekitarnya. Sebaliknya perkembangan daerah pedesaan juga akan sangat dipengaruhi oleh daerah perkotaan. Lantas diungkapkan pula bahwa menurut Bokemann (1999) secara empiris pertumbuhan wilayah dikaitkan dengan adanya spesialisasi, interaksi, sentralitas, rank-size-rule, dan dinamika pola permukiman.

(Capello R, 2011) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis efek limpahan, yaitu

efek teknologi, efek limpahan industri, dan efek limpahan pertumbuhan.

Efek limpahan pertumbuhan (growth spillovers) dapat dimaknai bahwa



pertumbuhan ekonomi satu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi satu daerah didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di sekitarnya melalui interaksi ekonomi. Sehingga pertumbuhan wilayah berlangsung akibat keterkaitan antar daerah yang kuat, dimana salah satu wilayah berfungsi sebagai pusat dan didukung wilayah lainnya sebagai hinterland.

2.1.5 Teori Konsumsi

Konsumsi merupakan determinan penting dalam aktivitas ekonomi di suatu wilayah, selain itu, konsumsi dapat menggambarkan sisi ekonomi individu atau rumah tangga yaitu bagaimana rumah tangga memproporsikan pendapatan yang dimilikinya. Salah satu komponen penting untuk menilai perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah pola pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga terhadap barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya serta berbagai jenis pelayanan. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya merupakan barang-barang konsumsi. Apabila pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan.

Pengeluaran per kapita digunakan untuk mengukur standar hidup manusia dengan melihat rata rata pengeluaran yang digunakan baik dalam bentuk barang konsumsi maupun non konsumsi. Menurut Keynes, faktor utama yang <an prestasi ekonomi suatu negara adalah pengeluaran agregat yang an pembelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Keputusan



konsumsi masyarakat mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek fluktuasi konsumsi memiliki pengaruh signifikan terhadap fluktuasi ekonomi dan dalam jangka panjang keputusan konsumsi rumah tangga akan berpengaruh pada variabel-variabel makro ekonomi lainnya (Persaulian, 2013).

Dalam konteks meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), teori konsumsi yang relevan adalah teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh ekonom Lucas (1988). Teori ini menekankan pentingnya akumulasi modal manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks pembangunan manusia. Menurut teori pertumbuhan endogen, konsumsi berperan penting dalam membentuk modal manusia, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu serta pembangunan suatu negara.

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Investasi pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara, sehingga sering disebut sebagai engine of growth. Teori tentang Capital Expenditures and Economic Growth didasarkan pada premis bahwa belanja modal (capital expenditures) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal mencakup investasi yang dilakukan perusahaan atau pemerintah untuk membeli aset produktif, seperti mesin, bangunan, atau jaringan transportasi. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik mengandalkan investasi a meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan investasi yang akumulasi kapital dapat dicapai. Investasi yang bersifat penanaman modal



langsung akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan output nasional. Pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori belanja modal pemerintah menurut Paul A. Samuelson, (1958) menyatakan bahwa investasi pemerintah dalam proyek-proyek produktif seperti infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Teori yang melandasi penelitian ini salah satunya adalah Teori Pertumbuhan Endogen yang dipelopori oleh (Romer, 1994). Teori tersebut mendorong pengeluaran pemerintah pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi kemajuan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen berpendapat demikian pertumbuhan ekonomi bergantung pada investasi pada sumber daya manusia, inovasi dan manajemen pengetahuan. Selain itu menurut (Olivier Blanchard, 2017) belanja modal pemerintah dapat meningkatkan tingkat produktivitas dan kapasitas produksi ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat jangka panjang. Namun, Blanchard juga menekankan bahwa belanja modal pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati dan efektif,



karena belanja modal yang tidak tepat sasaran atau tidak efektif dapat meningkatkan defisit fiskal dan utang pemerintah.

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting yang harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi daerah. Bahkan hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi tinggi merupakan sasaran utama dalam rencana pembangunan. Melalui pertumbuhan ekonomi tinggi, diharapkan kesejahteraan Masyarakat secara bertahap dapat pula ditingkatkan. Sehingga, dalam era otonomi, masing-masing daerah bersaing meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mendorong kemakmuran masyarakat setempat. Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus (1996) pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh peningkatan PNB potensial suatu negara. Menurutnya pertumbuhan ekonomi yang dimaksud tidak hanya berhenti pada pertumbuhan output per kapita, tapi juga pertumbuhan upah riil dan peningkatan standar hidup masyarakatnya. menurut

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi (Tarigan, 2003). Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu



selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment, yaitu bagian

pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Teori pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa interaksi wilayah yang tidak seimbang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Jika interaksi tersebut mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antarwilayah, maka hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih lemah dan menguntungkan wilayah yang lebih kuat. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial di antara wilayah-wilayah yang terlibat.

2.1.8 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan atau tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Garis kemiskinan dapat ditentukan berdasarkan standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Amartya sen menganggap kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk memperoleh kebebasan dan kemandirian yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar. Teori ini menekankan pentingnya memperkuat kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi. Teori trickle-



down effect yang dikembangkan pertama kali oleh (W. Arthur Lewis, 1954) . Didalam teori tersebut jelas bahwa kemakmuran yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi dengan sendirinya diawali oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Robert Chambers (2011) dalam menyebutkan ada lima dimensi ketidakberuntungan yang berinteraksi satu sama lain dan memerangkap orang miskin, yaitu: 1) kemiskinan itu sendiri (poverty), 2) kelemahan fisik (physical weakness) 3) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis, 4) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 5) ketidakberdayaan (powerless). Kenyataan di atas membutuhkan upaya perluasan pendekatan spasial dalam penyusunan program anti kemiskinan yang dijalankan pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Kemiskinan sebagai isu pembangunan lokal secara lokalitas memiliki keterkaitan erat dengan faktor lokasional dimana fenomena ini terjadi.

2.1 Hubungan Antar Variabel

2.1.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia



nurut UNDP (1996) hubungan timbal antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik. Artinya, pertumbuhan ekonomi

mempengaruhi pembangunan manusia. (Box et al., 2004) memberikan pendapatnya mengenai pembangunan manusia yang memiliki efek penting pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia dapat dilihat sebagai suatu aspek yang mungkin dapat mempengaruhi maksimalisasi keuntungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi selalu berhubungan dengan modal manusia melalui proses peningkatan yang total pendapatan, pendapatan per kapita penduduk sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia suatu wilayah (Suprpto et al., 2022). Maka dari itu tujuan akhir dari kebijakan dan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia, yang berarti implementasi kebijakan dan perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, menurut Boediono (2009), stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat tidak digerogeti oleh keanikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi bersama-sama adalah kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif makroekonomi hubungan tersebut dijelaskan oleh Mankiw (2007) dengan menyatakan bahwa, "Dalam jangka panjang, kapasitas negara untuk memproduksi barang dan jasa menentukan standar hidup penduduknya." Mankiw menjelaskan salah satu ukuran kesejahteraan ekonomi terbaik adalah PDB. PDB riil mengukur output barang serta jasa total perekonomian dan karena itu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan para penduduknya. Negara dengan PDB lebih tinggi memiliki egalanya lebih baik: rumah-rumah yang lebih besar, lebih banyak mobil,



lebih banyak penduduk melek huruf, perawatan kesehatan yang lebih baik, harapan hidup yang lebih panjang, dan lebih banyak koneksi internet. Berbeda dengan hipotesis *"trickle down effect"*, Barro (1991) menemukan hubungan sebab akibat antara tingkat kematian bayi dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga sejalan dengan teori "human capital". Dengan menyusun hubungan tersebut, Barro (1991) menolak hipotesis *"trickle down effect"* yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Bhalla (1994) membawa perspektif lain yang menghubungkan antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia). Ia menemukan pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, sebuah rezim demokratik cenderung lebih melindungi property dan hak kontrak yang sangat penting untuk berjalannya mekanisme pasar yang didorong oleh sektor swasta. Menurut Kuncoro (2010) walaupun Bhalla tidak secara langsung meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) dengan membalik sebab akibat, penemuannya mengimplikasikan hipotesis *"trickle down effect"* terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhatiannya adalah pada daya tahan demokrasi. Ketika demokrasi berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes pada kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia).

2.1.2 Hubungan Konsumsi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Konsumsi atau pengeluaran masyarakat adalah salah faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia karena konsumsi dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup individu dalam suatu



masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ketika pendapatan seseorang meningkat, maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan utamanya, sehingga dapat melakukan tambahan konsumsi (marginal prosperity to consume) (Atmaja et al., 2022). Tingkat konsumsi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Konsumsi mencakup pengeluaran individu atau rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Konsumsi yang meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup individu, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Melalui Teori Konsumsi Keynes, disebutkan bahwa tingkat konsumsi akan semakin besar jika memiliki pendapatan yang besar pula. Sehingga dengan penambahan pendapatan akan berpengaruh terhadap penambahan konsumsi yang dihitung melalui MPC (Marginal Propensity to Consume). Sejalan dengan peneltiian yang dilakukan oleh (Pramesti & Indrasetianingsih, 2020) menemukan bahwa faktor yang berpengaruh positif terhadap perubahan ipm di kabupaten/kota di jawa timur adalah pengeluaran perkapita. Pengeluaran per kapita yang tinggi cenderung memiliki IPM yang tinggi juga, karena pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.3 Hubungan Belanja Modal terhadap IPM

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang mencerminkan pengeluaran dalam bentuk pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap. Dengan ini perlu ada kebijakan yang cepat dan tepat dari pemerintah



daerah. Melalui belanja modal ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah itu sendiri dan menjadi daerah yang mandiri agar infrastruktur baik jalan maupun yang lainnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat (Bado et al., 2019).

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila pemerintah dan swasta bermitra dalam berbagai sektor secara berkesinambungan. Proses transmisi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni pemerintah di dorong untuk meningkatkan alokasi belanja modal APBD setiap tahunnya. Melalui alokasi belanja modal pada APBD tersebut, pemerintah daerah berusaha secara langsung menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan yang di implementasikan setiap tahunnya. Melalui pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan yang bersifat padat karya pembangunan diharapkan dapat mendatangkan investasi swasta, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan terbuka kesempatan kerja serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hasil studi menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat seperti yang diteliti oleh Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM seperti penelitian (Muhammad Tariq Majeed dan Saima Batool, 2018) Artikel ini menunjukkan bahwa belanja publik pada sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh positif yang signifikan pada IPM, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Hubungan Jumlah Penduduk Miskin terhadap IPM



emiskinan dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
emiskinan dapat mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya

dan layanan penting bagi kesejahteraan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM sendiri merupakan indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan manusia, dan salah satu dimensinya adalah pendapatan, yang menjadi salah satu indikator kemiskinan. Kemiskinan dapat mempengaruhi IPM melalui Akses terhadap pendidikan akses terhadap kesehatan pendapatan oleh karena itu, untuk meningkatkan IPM, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program-program yang meningkatkan akses individu terhadap pendidikan dan kesehatan, serta program-program yang meningkatkan pendapatan individu dan negara. Selain itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan juga perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah. Dengan demikian, dapat dicapai peningkatan Indeks pembangunan manusia yang berkelanjutan dan merata di seluruh masyarakat. Berdasarkan konsep pembangunan manusia menurut United Nations Development Programme (UNDP) bahwa pembangunan manusia adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan manusia melalui peningkatan akses individu terhadap sumber daya dan layanan penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Oleh karena itu, teori ini menghubungkan kemiskinan dengan IPM, karena kemiskinan dapat mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya dan layanan penting tersebut.

2.2 Tinjauan Empiris

Laksono et al., (2018) menulis penelitian yang menggunakan analisis

Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengeksplorasi pengaruh spasial
ihan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hasil uji Lagrange Multiplier



menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di saling mempengaruhi satu dengan yang lain dalam jangka panjang. Estimasi parameter pada spatial lag model menunjukkan bahwa pengaruh spasial pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota tersebut bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Timur belum berjalan secara sinergis.

Sukmawati (2022) menulis penelitian tentang Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dengan Spatial Error Model (SEM) menggunakan analisis regresi spasial untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM provinsi di Indonesia agar dapat mengakomodasi efek spasial data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB dan KAWN berpengaruh signifikan terhadap IPM. Variabel PDRB memiliki hubungan positif sedangkan variabel KAWN memiliki hubungan negatif terhadap IPM. Sementara itu, variabel EXPH tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia. Model SEM merupakan model terbaik karena memiliki nilai AIC yang lebih kecil dibandingkan model OLS.

Priyarsono, (2017) melakukan penelitian tentang Dampak *Spillover* Pusat-Pusat pertumbuhan di Kalimantan yang menggunakan menggunakan Lagrange Multiplier Spatial Lag Dependent. Hasilnya ternyata membuktikan bahwa pertumbuhan output, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan investasi yang terjadi pada pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan secara signifikan memberikan dampak spillover negatif (*backwash effect*) terhadap wilayah sekitarnya. Pusat-pusat pertumbuhan secara signifikan berdampak spillover positif

effect) terhadap wilayah sekitarnya apabila pertumbuhan output, tenaga kerja, dan pertumbuhan investasi pada pusat-pusat



pertumbuhan disertai dengan aliran ekonomi ke wilayah sekitarnya. Dengan demikian, pengembangan wilayah pusat-pusat pertumbuhan di Kalimantan di masa mendatang harus diarahkan pada upaya peningkatan transaksi perdagangan antarwilayah agar dampak spillover positif dapat terjadi seperti yang diharapkan dan pertumbuhan yang diikuti pemerataan antarwilayah di Kalimantan niscaya akan terwujud.

Saikia, (2019) meneliti mengenai *Impact of Urban Centre on Countryside in Assam: A Case Study of Tezpur and Its Periphery* menggunakan analisis statistik, rasio, diagram dan uji korelasi. Mengungkapkan bahwa kota Tezpur memiliki dampak yang jelas terhadap perekonomian daerah tetangga. Daerah yang lebih dekat ke kota paling diuntungkan oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh pemerintah kota. Konsekuensi kenaikan tingkat upah desa juga bermanfaat bagi para pekerja yang tinggal di desa, bahwa desa yang lebih dekat dengan pusat Kota lebih banyak posisi yang menguntungkan dalam mengambil kesempatan kerja yang disediakan oleh pusat kota.

Samallo et al. (2018) menulis penelitian dengan menggunakan Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spatial Error Model (SEM) untuk mengidentifikasi Pengaruh Variabel X terhadap nilai IPM dan pola IPM distribusi di suatu wilayah dengan estimasi parameter Ordinary Linear Square (OLS). Dari data peta tematik yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pola dari sebaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Maluku tidak berpengaruh pada jarak suatu wilayah. Ada korelasi antar komponen IPM penyusun nilai IPM di Provinsi Maluku, karena ada spasialnya ketergantungan pada variabel dependen.

nilai Lambda yang bertanda negative dan signifikan pada $\alpha = 10\%$ kan tidak adanya korelasi nilai IPM pada awilayah dengan wilayah lain



yang berdekatan. Juga ditunjukkan oleh residu spasial di sekitarnya daerah tidak memiliki karakteristik yang sama.

Penelitian yang dilakukan Pramesti and Indrasetianingsih (2020) dengan memodelkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi IPM kabupaten/kota se-Timur Provinsi Jawa 2016 yaitu pengeluaran per kapita, angka penyebaran penyakit, persentase penduduk miskin dan rata-rata lama sekolah. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan regresi spasial. Hasil analisis diperoleh bahwa variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 adalah pengeluaran per kapita, persentase penduduk miskin dan rata-rata tahun sekolah. Pemodelan dengan kesalahan spasial hasil regresi lebih baik jika dibandingkan dengan spasial lag regresi, karena model regresi kesalahan spasial memiliki lebih rendah AIC (Kriteria Informasi Akaike)

Sun et al., (2015) melakukan penelitian berjudul "Economic spillover effects in the Bohai Rim Region of China" menemukan bahwa adanya autokorelasi spasial yang signifikan di Wilayah Lingkar Bohai. Efek spillover spasial ekonomi juga terjadi di wilayah Lingkar Bohai. "Jarak dari pantai" memberikan negatif secara signifikan terhadap PDB per kapita lokal, tetapi berdampak positif secara signifikan terhadap PDB per kapita PDB per kapita kabupaten lain. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi di wilayah pesisir kabupaten pesisir tidak memberikan manfaat bagi seluruh wilayah. "Nilai ekspor" memberikan pengaruh positif yang signifikan positif secara signifikan terhadap ekonomi lokal dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kabupaten lain, sedangkan "investasi asing asing" memberikan



yang signifikan positif terhadap perekonomian lokal dan pengaruh yang negatif terhadap kabupaten lainnya. "Jumlah karyawan dalam unit"

memberikan pengaruh yang signifikan positif signifikan terhadap ekonomi lokal dan pengaruh negatif signifikan terhadap kabupaten lainnya

